



## Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.  
✉: [seknas\\_fitra@yahoo.com](mailto:seknas_fitra@yahoo.com) / [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org)  
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

---

<b>Jenis Berkas</b>	Press Release	<b>No. Arsip</b>	PR.13.05/03-8
<b>Judul</b>	<b>Inilah Menteri-Menteri dari Partai Politik yang Sub Judul</b>	<b>Tanggal</b>	03-Mei-2013
	<b>“departemennya” Merugikan Pajak Rakyat.</b>	<b>Tahun</b>	2013
<b>Event Terkait</b>		<b>Penulis</b>	Uchok Sky Khadafi
<b>Kata Kunci</b>	Audit BPK 2012		

---

### **SiaranPers**

#### **Inilah Menteri-Menteri dari Partai Politik yang “departemennya” Merugikan Pajak Rakyat.**

Menteri-menteri dari Partai politik dalam pengelolaan anggaran mereka sangat jelek , dan ambradul sehingga ditemukan adanya indikasi kerugian Negara. Indikasi kerugian Negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Kerugian Negara tersebut ditemukan dalam Audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat bahwa Kerugian negara sebesar Rp. 8,311,534,656,000 untuk 1950 kasus untuk 15 lembaga atau kementerian. Yang dimaksud dengan kerugian negara, ada dua kategori, yang pertama, adalah Kementerian sudah memberikan laporan keuangan tetapi belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut. Oleh karena, laporan tidak sesuai standar auditor, maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara; yang kedua, pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas Negara.

Kemudian, ke 15 lembaga Negara adalah :

1. Kementerian Kehutanan, Kerugian Negara sebesar Rp.7.1 Triliun, ditambah dengan USD.36,138,280 dengan 278 kasus.
2. Kementerian ESDM , kerugian Negara sebesar Rp.379.1 milyar ditambah dengan USD.28,035,280, dengan 72 kasus
3. Kemenko Kesra, kerugian Negara sebesar Rp.268.9 milyar dengan 76 kasus
4. Kementerian pertanian, kerugian Negara sebesar Rp.200.4 miliar dengan 127 kasus
5. Kemenkoinfo, kerugian Negara sebesar Rp.174 milyar ditambah dengan USD. 13,720, dan KRW. 3,075,010 dengan 198 kasus
6. Kemeneterian Agama kerugian Negara sebesar Rp.79 milyar ditambah dengan USD. 149,510 dengan 572 kasus
7. Kementerian Sosial, kerugian Negara sebesar Rp.17.6 milyar dengan 84 kasus

---

Office : Mampang Prapatan IV Jl. K No. 37 Jakarta Selatan  
Tlp. 021-7947608 Email: [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org) | [seknas\\_fitra@yahoo.com](mailto:seknas_fitra@yahoo.com)  
[www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org) | [www.budget.info.com](http://www.budget.info.com)

8. Kementerian Nakertrans kerugian Negara sebesar Rp.17 milyar USD.186,800 dengan 115 kasus.
9. Kementerian perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp.11 milyar ditambah USD.145,130 dengan 167 kasus.
10. Kementerian perumahan Rakyat sebesar Rp.7.9 milyar dengan 15 kasus
11. Kementerian kelautan dan Perikanan sebesar Rp.7.6 milyar dengan 138 kasus
12. Kementerian Koperasi dan UKM, kerugian Negara sebesar Rp.5.7 milyar dengan 17 kasus
13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp.2.4 miliar dengan 71 kasus
14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp.888 juta dengan 14 kasus
15. Kementerian PAN dan Refromasi birokrasi, kerugian negaran sebesar Rp.566 juta dengan 6 kasus

Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Lembaga Negara	Kerugian Negara	Jumlah Kasus
1	Kemenaterian Kehutanan	7,138,804,110,000	278
2	Kementerian ESDM	379,120,310,000	72
3	Kemenko Kesra	268,906,260,000	76
4	Kementerian pertanian	200,454,320,000	127
5	Kemenkoinfo	174,097,420,000	198
6	Kementerian Agama	79,091,340,000	572
7	Kementerian Sosial	17,688,410,000	84
8	Kementerian Nakertrans	17,023,210,000	115
9	kementerani Perhubungan	11,046,216,000	167
10	Kementerian Perumahan Rakyat	7,963,470,000	15
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7,631,680,000	138
12	kementerian Kop dan UKM	5,771,540,000	17
13	Kementerian Hukum dan HAM	2,481,270,000	71
14	Kementerian PDT	888,160,000	14
15	Kementeri PAN dan Reformasi Birokrasi	566,940,000	6

Sumber seknas FITRA diolah dari hasil Audit BPK semester II tahun 2012

Dari Gambaran diatas, kami dari seknas FITRA mempunyai catatan sebagaiberikut:

- 1). Menteri-menteri dari partai politik dalam pengelolaan APBN pada kementerian, ternyata kurang serius, kurang top, dan jauh dari kebaikan dalam manajemen keuangan. Karena susah untuk memisahkan dengan jelas antara apakah menteri bekerja untuk kebutuhan pribadi dan partainya atau untuk kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan anggaran Negara.
- 2).Menteri-menteri yang ingin jadi caleg, sebetulnya tidak layak dicalonkan lagi sebagai Caleg dari partai mereka masing-masing. Karena, dalam pengelolaan anggaran Negara atau tanggungjawab pengelolaan Negara atas departemen mereka pimpin, masih ada kerugian Negara atau indikasi korupsi atas kementerian yang mereka pimpin. Selayaknya, kalau mau jadi caleg, berarti jadi pejabat public. kalau ingin jadi pejabat publik berarti harus menyelesaikan persoalan adanya indikasi kerugian negara ini agar bisa dikatakan sebagai pejabat Negara yang bersih.
- 3). Menteri-menteri ini jadi caleg seharusnya mundur dari jabatan menteri. Karena mereka jadi caleg akan membebani APBN. Memakai fasilitas Negara dan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. APBN itu bukan dipergunakan untuk kebutuhan partai atau pribadi menteri tersebut untuk kebutuhan seluruhan rakyat.
- 4). Menteri-menteri yang jadi caleg dan ngotot jadi caleg dari partai ternyata bukan hanya haus kekuasaan, tetapi seperti mereka dibayang-bayangin oleh ketakutan mereka sendiri, karena takut berhadapan atau diperiksa aparat hukum seperti KPK .

untuk itu, kami dari seknas FITRA meminta kepada menteri yang sudah menjadi caleg segera mengundurkan diri saja. Supaya fasilitas Negara dan uang Negara seperti uang operasional menteri yang setiap tahun diberikan Negara menimal sebesar Rp.1.2 milyar tidak dimanfaatkan dan salahgunakan untuk kepentingan pribadi dan partai mereka.

Jakarta, 1 Mei 2013

Uchok Sky Khadafi

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA